



Analisis Mekanisme Dalam Permintaan dan Pembatalan Faktur Pajak Pada PT Angkasa Pura Suport Cabang Makassar

The Analysis of Mechanism in Request and Cancellation of Tax Invoices at PT Angkasa Pura Suport (APS) Branch Makassar

Nur Mutmainna¹, Karmilah²

^{1,2}Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

Email : karmilah.dty@uim-makassar.ac.id

Keywords:

Cancellation
Tax Invoice
Mechanism
Request

ABSTRACT

This study aims to find out (1) How are the mechanisms in tax invoices request and cancellation at PT. APS, branch Makassar (2) What are obstacles of PT APS, branch Makassar in tax invoices request (3) What factors cause the tax invoices cancellation at PT.APS, branch Makassar (4) What are the impacts of tax invoices cancellation on PT. APS, branch Makassar. Type of the research was qualitative research through observations, interviews, and documentation. In analyzing data, the researcher applied data reduction techniques, data presentation, and conclusions. The results showed that (1) The mechanism in tax invoices request and cancellation at PT. APS, branch Makassar is carried out centrally which is requested via email (2) obstacles of PT APS, branch Makassar in tax invoices request is an unstable internet connection, email which experienced down server, and the time gap of working hours between central and the Makassar branch office (3) Internal factors which cause the tax invoices cancellation at PT. APS, branch Makassar are human error, meanwhile the external factors are changes in the invoice value (4) the impact of tax invoices cancellation on PT. APS, branch Makassar is the imposition of administrative penalty to employees who causes the tax invoices cancellation.

Kata Kunci:

Faktur Pajak
Mekanisme
Permintaan
Pembatalan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Bagaimana mekanisme dalam permintaan dan pembatalan faktur pajak pada PT. APS cabang Makassar (2) Apa hambatan yang dihadapi PT. APS cabang Makassar dalam melakukan permintaan faktur pajak (3) Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam terjadinya pembatalan faktur pajak pada PT. APS cabang Makassar (4) Apa saja dampak PT. APS cabang Makassar ketika melakukan pembatalan faktur pajak. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teknik Reduksi Data, Penyajian Data,

Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme permintaan dan pembatalan faktur pajak pada PT. APS cabang Makassar dilakukan secara terpusat yang diminta melalui via *email* (2) hambatan yang kerap dihadapi oleh PT. APS cabang Makassar dalam permintaan faktur pajak ialah koneksi internet yang tidak stabil, *email* yang sering mengalami *server down*, dan perbedaan waktu dalam jam kerja kantor pusat dan kantor cabang Makassar (3) faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan faktur ialah *human error*, dan faktor eksternalnya ialah perubahan nilai dalam *invoice* (4) dampak PT. APS cabang Makassar ketika melakukan pembatalan faktur pajak ialah dikenakan sanksi administrasi kepada pegawai yang menyebabkan terjadinya pembatalan faktur pajak.

A. PENDAHULUAN

Pungutan masyarakat yang sangat potensial bagi negara salah satunya adalah pajak pertambahan nilai. Hal ini tidak lain karena negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi serta tingkat konsumtif dan produktivitas yang juga ikut meningkat. Dengan tingginya tingkat konsumtif masyarakat, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang sering berputar di kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Indonesia. Mulai dari transaksi barang di minimarket, hingga transaksi pengadaan barang ataupun jasa pada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Alur prosedur pemungutan hingga penyetoran PPN ada dipihak pengusaha ataupun penghasil Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang disebut dengan istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada saat BKP dan/atau JKP diserahkan kepada konsumen dengan menggunakan *credit method* dalam perhitungan PPN yang terutang, maka PKP harusnya mengambil PPN terutang serta menyerahkan bukti pungutan pajak yang disebut dengan faktur pajak. jadi, faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dilakukan dengan PKP pada saat menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada konsumen. Reformasi administrasi perpajakan terus mengalami kemajuan, Sehingga dapat dikategorikan bahwa layanan sistem sudah sesuai dengan targetnya (Karmila & Nurhikma, 2021). Hal ini juga berlaku dalam pelaporan PPN dan pembuatan bukti pemungutan pajak yang terus mengalami perkembangan sebagai bentuk reformasi perpajakan. Diawali dari pelaporan manual dalam bentuk kertas sampai dengan pelaporan dalam bentuk elektronik, Melalui pendekatan praktis dan interaktif, peserta didorong untuk memahami pentingnya pemahaman pajak dalam mengelola bisnis mereka secara efisien dan berkelanjutan (Norhaedah, *et al*, 2023). Yang kemudian pembuatan faktur pajak dalam bentuk elektronik itu disebut dengan e-faktur yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak membuat e-faktur dimaksudkan agar PKP dapat menerbitkan faktur pajak secara efektif, nyaman serta merasa aman selama melaksanakan kewajibannya dalam menerbitkan faktur pajak. PT. Angkasa Pura Suport merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa serta salah satu PKP yang memiliki tanggung jawab untuk membuat bukti pungutan pajaknya. PT. Angkasa Pura Suport sendiri memiliki beberapa cabang di Indonesia. Sebagai PKP yang memiliki cabang, PT. Angkasa Pura Suport memiliki sistem administrasi perpajakan secara terpusat. PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar sendiri memiliki mekanisme administrasi perpajakan yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan tidak didesentralisasikannya administrasi perpajakan pada setiap perusahaan cabangnya. Hal ini menyebabkan alur administrasi perpajakan pada PT. Angkasa Pura Suport cabang Makassar tidak efisien dan cukup rumit. Sebagai PKP cabang yang membutuhkan faktur pajak, PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar memiliki mekanisme permintaan faktur pajak. Hal ini dimulai dari permintaan *invoice* (Surat Tagihan) yang diterbitkan oleh PT. Angkasa Pura Suport Pusat, setelahnya baru dapat dilakukan penerbitan faktur pajak sehingga ini menjadi tidak efektif dalam permintaan faktur pajak pada PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar sendiri.

Sama halnya dengan pembatalan faktur pajak. Pembatalan faktur pada PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar dapat terjadi ketika pegawai pajak melakukan kesalahan baik dalam penginputan maupun faktor lainnya. Faktur pajak diterbitkan pada perusahaan pusat, dan jika terjadi pembatalan faktur pajak maka akan dilakukan beberapa prosedur. Mulai dari menerbitkan berita acara kronologis, hingga menunggu persetujuan direksi-direksi terkait. Penelitian ini dilandasi dengan *research gap* (hasil penelitian) pada penelitian-penelitian terdahulu. Bersumber pada penelitian yang dilakukan oleh (Rukmania, 2019), memperlihatkan hasil penelitian bahwa penggunaan e-faktur membuat keefektifan dan rasa nyaman dalam perhitungan dan pembuatan faktur pajak pada CV. Agung Advertising Makassar. Tetapi tidak adanya fitur penyetoran dan pelaporan dalam e-faktur adalah sebuah kekurangan dalam e-faktur itu sendiri. Serta ketika aplikasi mengalami error ataupun jaringan internet tidak stabil merupakan kendala yang sering dialami oleh CV. Agung Advertising Makassar. Penelitian tentang analisis sistem administrasi penerbitan faktur pajak pada PKP telah dilakukan oleh (Muhtarudin and Chairunnisa 2022) menunjukkan hasil bahwa YR Konsultan Pajak telah melakukan penerbitan faktur pajak atas transaksi yang dilakukan oleh klien sesuai dengan syarat formal dan syarat materiil. Serta menggunakan e-faktur dalam memudahkan proses penerbitan faktur pajak. Tetapi buruknya jaringan internet kerap kali menjadi hambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Alfath Annisaa and Nuryanah 2023) menunjukkan hasil PT. X sudah menerapkan manajemen perpajakan atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait PPN dengan baik. Namun, PT. X dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpajakannya dengan membuat SOP baku tertulis serta menjalankan rekomendasi perpajakan guna meminimalisir permintaan perubahan faktur pajak serta mengatasi faktur pajak yang tidak valid. Sedangkan penelitian tentang pembatalan faktur pajak dilakukan oleh (Kurniawan 2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa faktur pajak pengganti dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan maupun penginputan data contohnya kesalahan dalam penulisan nama, alamat, nama dan jumlah barang ataupun jasa, harga, DPP serta PPN dalam faktur pajak. Adapun pembatalan faktur pajak terjadi apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data seperti NPWP serta terjadi pembatalan transaksi jual-beli antara PKP dan konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh (Maulana 2018) juga menunjukkan hasil jika faktor yang menjadi pemicu terjadinya pembatalan faktur pajak ialah *human error*. Dimana hal ini merupakan kelalaian yang dilakukan oleh manusia baik itu pelanggaran yang biasa maupun yang tidak biasa dilakukan. Faktur pajak yang dibatalkan seharusnya dilaporkan kepada KPP penjual dan KPP pembeli dengan maksud dapat menghindari kesalahan ataupun pelanggaran peraturan.

B. METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami mekanisme permintaan dan pembatalan faktur pajak di PT. Angkasa Pura Suport cabang Makassar. Penelitian dilakukan di lokasi perusahaan pada periode Desember 2023 hingga Februari 2024 dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Staf Pajak serta *Finance & Accounting*, dan data sekunder dari literatur yang relevan. Fokus penelitian meliputi analisis mekanisme serta hambatan dalam permintaan dan pembatalan faktur pajak. Informan penelitian terdiri dari *Finance & Accounting Supervisor* dan Staf *Collection*. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, alat perekam, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

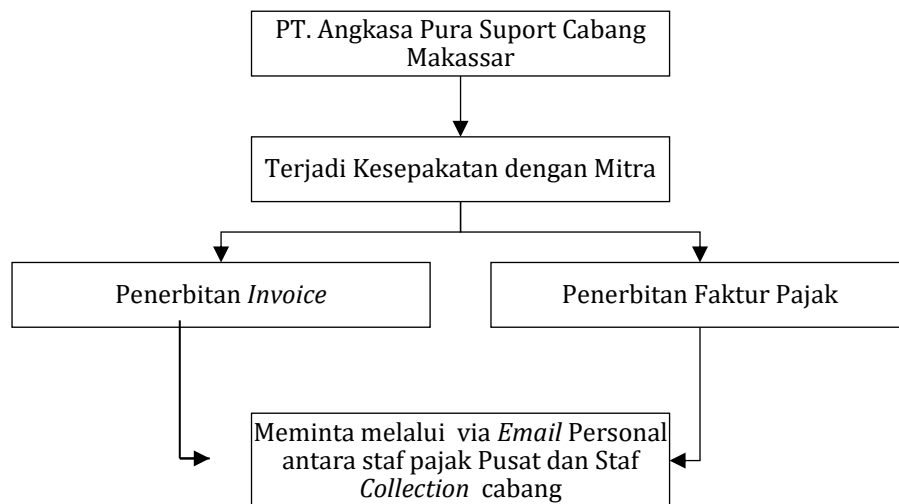
1. Mekanisme Permintaan dan Pembatalan Faktur Pajak Pada PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar

a. Mekanisme Permintaan Faktur Pajak

Permintaan faktur pajak pada PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar dilakukan melalui PT. Angkasa Pura Suport Pusat yang berlokasi di Jakarta Pusat. Hal ini berbeda dengan kebanyakan perusahaan yang menggunakan aplikasi e-Faktur secara langsung. Mekanisme ini melibatkan permintaan faktur pajak melalui email personal kepada staf pajak perusahaan pusat. Faktur pajak diterbitkan berdasarkan nomor invoice yang juga diterbitkan oleh perusahaan pusat. Hasil wawancara dengan staf collection, Muh. Ridwan Said, pada 16 Januari 2024 mengungkapkan bahwa sistem administrasi perusahaan masih terpusat, sehingga permintaan faktur pajak harus diajukan melalui kantor pusat. Hal ini didukung oleh pernyataan staf accounting & budgeting, Andi Fardiva, yang menegaskan bahwa seluruh administrasi keuangan, termasuk penerbitan faktur pajak, dilakukan secara terpusat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keuntungan dari sistem administrasi terpusat adalah pengurangan biaya operasional serta pengawasan yang lebih ketat terhadap cabang-cabang perusahaan guna meminimalisir risiko korupsi dan kecurangan pegawai.

Adapun mekanisme permintaan faktur pajak pada PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar sebagai berikut :

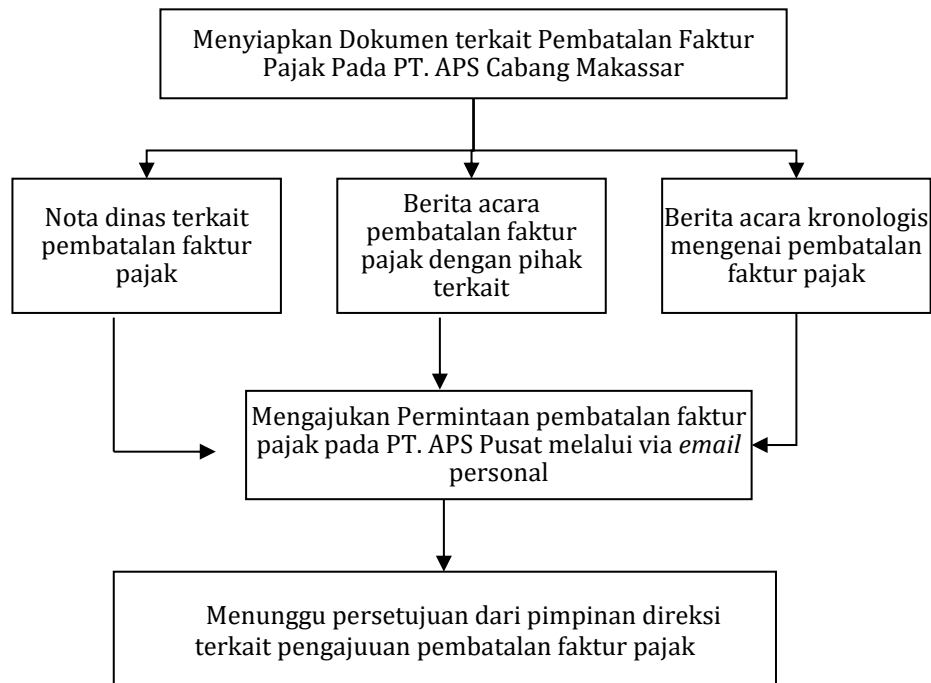
Gambar 1 Mekanisme Permintaan Faktur Pajak



b. Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak

Mekanisme pembatalan faktur pajak pada PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar juga dilakukan melalui persetujuan beberapa pimpinan divisi keuangan dan *risk management* di kantor pusat. Berdasarkan wawancara dengan Muh. Ridwan Said, proses pembatalan memerlukan dokumen pendukung seperti nota dinas, berita acara pembatalan, serta *invoice* yang dibatalkan. Pernyataan dari Rizqa Khaerani, staf *finance & accounting*, pada 16 Januari 2024 menegaskan bahwa pembatalan faktur pajak mempertimbangkan dokumen pendukung, alasan pembatalan, dan tenggat waktu pembetulan SPT Masa PPN. Pegawai yang melakukan kesalahan dalam penginputan data akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau denda materil. Mekanisme ini memastikan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan cabang, tetapi juga menghambat efisiensi kerja. Oleh karena itu, desentralisasi sistem administrasi perpajakan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas kerja di cabang-cabang perusahaan. Adapun mekanisme pembatalan faktur pajak sebagai berikut :

Gambar 2 Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak Pada PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar



2. Hambatan Dalam Permintaan Faktur Pajak

Hambatan utama yang dihadapi PT. Angkasa Pura Suport Cabang Makassar dalam permintaan faktur pajak meliputi:

- Koneksi internet tidak stabil, yang memperlambat proses komunikasi dan permintaan faktur.
- Server email down, yang menghambat pengiriman dan penerimaan permintaan faktur pajak.
- Perbedaan waktu antara kantor pusat dan cabang, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan faktur pajak.

Hambatan ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan Muh. Ridwan Said dan Rizqa Khaerani, yang menyatakan bahwa sering terjadi gangguan pada sistem email akibat penumpukan file serta penggunaan yang berlebihan.

3. Faktor Penyebab Pembatalan Faktur Pajak

Faktor penyebab pembatalan faktur pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Faktor Internal

Kesalahan dalam penginputan data, seperti NPWP, alamat, dan nominal, menjadi faktor utama pembatalan faktur pajak. Hal ini disampaikan oleh Muh. Ridwan Said, yang mengungkapkan bahwa ketidaktepatan pegawai dapat menyebabkan kesalahan yang berdampak pada pembatalan faktur.

b. Faktor Eksternal

Perubahan nilai dalam invoice akibat permintaan klien juga menjadi penyebab pembatalan faktur pajak. Rizqa Khaerani menegaskan bahwa perubahan ini mengharuskan penerbitan faktur pajak pengganti untuk menyesuaikan dengan invoice yang telah diperbarui.

4. Dampak Pembatalan Faktur Pajak

Secara umum, pembatalan faktur pajak tidak berdampak langsung pada perusahaan cabang, tetapi berdampak pada pegawai yang melakukan kesalahan. Pegawai yang melakukan kesalahan secara berulang akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau denda.

materil. Andi Fardiva menegaskan bahwa sanksi ini berlaku baik untuk pegawai di kantor cabang maupun di kantor pusat yang melakukan kesalahan dalam penginputan data. Sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan ketelitian pegawai dalam proses administrasi perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem administrasi perpajakan yang terpusat pada PT. Angkasa Pura Suport memberikan keunggulan dalam pengawasan dan transparansi, tetapi juga memiliki kelemahan dalam hal efisiensi dan efektivitas kerja di kantor cabang. Desentralisasi sistem administrasi perpajakan dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi hambatan yang sering terjadi.

Pembahasan

1. Mekanisme Dalam Permintaan dan Pembatalan Faktur Pajak Pada PT. Angkasa Pura Suports Cabang Makassar

a. Mekanisme Permintaan Faktur Pajak

Permintaan faktur pajak pada PT. Angkasa Pura Suports Cabang Makassar diawali dengan kesepakatan antara mitra dan vendor terkait pekerjaan atau penyewaan barang dan/atau jasa yang akan digunakan. Setelah kesepakatan tercapai, staf collection mengajukan permintaan invoice kepada staf collection PT. Angkasa Pura Suports Pusat melalui email resmi. Invoice ini menjadi dasar permintaan penerbitan faktur pajak. Staf collection kemudian meminta penerbitan faktur pajak kepada staf pajak PT. Angkasa Pura Suports Pusat melalui email resmi mereka. Faktur pajak yang diterbitkan harus sesuai dengan nomor invoice yang telah diterbitkan oleh PT. Angkasa Pura Suports Pusat. Setelah faktur pajak terbit, mitra melakukan pembayaran sesuai dengan surat tagihan yang telah diterbitkan.

b. Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak

Jika terjadi pembatalan faktur pajak, langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan nota dinas pembatalan faktur pajak. Nota dinas ini disetujui oleh branch manager cabang. Setelah itu, PT. Angkasa Pura Suports Cabang Makassar membuat berita acara pembatalan faktur pajak dengan pihak terkait untuk mengkonfirmasi pembatalan pajak yang telah diterbitkan.

Selain itu, dibuat juga berita acara kronologis pembatalan faktur pajak yang berisi penjelasan lengkap mengenai alasan pembatalan. Setelah semua dokumen lengkap, staf collection mengajukan permintaan pembatalan faktur pajak kepada staf administrasi pajak PT. Angkasa Pura Suports Pusat.

Persetujuan pembatalan faktur pajak diberikan oleh pimpinan divisi keuangan & risk management pusat setelah mempertimbangkan:

1. Kelengkapan dokumen pembatalan.
2. Kelogisan kronologi pembatalan faktur pajak.
3. Tenggat waktu pembetulan SPT Masa PPN.

Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalisir tindak kecurangan dan memastikan kepatuhan perpajakan. Namun, mekanisme yang terpusat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengajuan dan pembatalan faktur pajak.

2. Hambatan Dalam Permintaan Faktur Pajak

Beberapa hambatan dalam mekanisme permintaan faktur pajak di PT. Angkasa Pura Suports Cabang Makassar meliputi:

1. Gangguan koneksi internet. Permintaan faktur pajak dilakukan secara online sehingga gangguan koneksi dapat memperlambat proses.
2. Kendala pada email. Server down atau kapasitas penyimpanan penuh dapat menghambat pengiriman dan penerimaan faktur pajak.
3. Perbedaan waktu operasional. Kantor pusat berada di Jakarta (WIB), sedangkan kantor cabang di Makassar (WITA), sehingga ada keterlambatan dalam koordinasi kerja.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, PT. Angkasa Pura Suports Cabang Makassar telah menyediakan:

1. Beberapa jaringan Wi-Fi untuk memastikan koneksi tetap stabil.
2. Komunikasi melalui WhatsApp sebagai alternatif jika email bermasalah.
3. Pengajuan permintaan faktur pajak lebih awal jika ada kebutuhan mendesak di pagi hari.

3. Faktor Penyebab Pembatalan Faktur Pajak

a. Faktor Internal

Kesalahan internal dalam pembatalan faktur pajak sering kali terjadi akibat human error, seperti ketidaktepatan karyawan dalam menginput data atau mengajukan permintaan faktur pajak. Faktor yang mempengaruhi kesalahan ini meliputi:

1. Faktor individu. Kelelahan, tekanan mental, atau kondisi medis karyawan.
2. Faktor pekerjaan. Lingkungan kerja yang kurang kondusif, prosedur kerja yang tidak jelas, atau beban kerja berlebihan.
3. Faktor manajemen. Komunikasi satu arah dan prosedur kerja yang kurang efektif.

b. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal pembatalan faktur pajak meliputi:

1. Perubahan nilai kontrak. Terjadi perubahan harga barang dan/atau jasa sebelum kontrak baru dibuat.
2. Perubahan tarif pajak. Contohnya, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mempengaruhi nilai tagihan.

4. Dampak Pembatalan Faktur Pajak

Pembatalan faktur pajak memiliki beberapa konsekuensi, baik bagi perusahaan maupun karyawan:

1. Bagi perusahaan pusat, jika tidak dilaporkan dengan benar, dapat dikenakan denda 2% dari DPP atau sanksi pidana jika terjadi penggelapan pajak.
2. Bagi perusahaan cabang, konsekuensi lebih kepada karyawan yang melakukan kesalahan dalam pengajuan faktur pajak, seperti: Peringatan tertulis untuk kesalahan yang tidak disengaja dan Denda materil bagi karyawan yang melakukan kesalahan berulang.

Sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan menghindari kesalahan serupa di masa mendatang. Dengan adanya sistem terpusat, PT. Angkasa Pura Suports berusaha meminimalisir risiko kesalahan dalam permintaan dan pembatalan faktur pajak, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi agar prosesnya lebih efisien dan efektif.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme permintaan dan pembatalan faktur pajak pada PT. Angkasa Pura Suports Cabang Makassar, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang diterapkan bersifat terpusat. Mekanisme permintaan faktur pajak harus diajukan melalui kantor pusat di Jakarta, yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam proses administrasi keuangan. Namun, sistem ini memiliki kelemahan dalam hal efisiensi dan efektivitas kerja, terutama di tingkat cabang. Dalam proses permintaan faktur pajak, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti gangguan koneksi internet, kendala pada server email, serta perbedaan zona waktu antara kantor pusat dan cabang. Hambatan ini menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak dan dapat memengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, perusahaan telah mengambil langkah-langkah seperti menyediakan jaringan internet yang lebih stabil, alternatif komunikasi melalui WhatsApp, serta perencanaan pengajuan permintaan lebih awal. Adapun pembatalan faktur pajak dilakukan berdasarkan persetujuan dari beberapa pimpinan di kantor pusat, dengan mempertimbangkan dokumen pendukung serta alasan pembatalan. Faktor penyebab pembatalan faktur pajak terbagi menjadi faktor internal, seperti kesalahan penginputan data oleh pegawai, dan faktor eksternal, seperti perubahan nilai kontrak atau tarif pajak. Konsekuensi dari kesalahan ini dapat berupa sanksi administrasi bagi pegawai yang terlibat, sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Dengan demikian, meskipun sistem administrasi yang terpusat memiliki manfaat dalam pengawasan dan akuntabilitas, terdapat tantangan dalam hal efisiensi yang perlu diperbaiki. Desentralisasi sistem administrasi perpajakan dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas kerja, mengurangi hambatan dalam proses administrasi, serta mempercepat proses permintaan dan pembatalan faktur pajak di tingkat cabang.

REFERENSI

- Alfath Annisaa, M., & Nuryanah, S. (2023). Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X). *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2532–2549. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.408>
- Karmila, & Nurhikma. (2021). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 4(1), 338–355. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334>
- Kurniawan, F. (2020). *Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak Dan Penerbitan Faktur Pajak Pengganti Atas Faktur Pajak Tidak Lengkap Pada Pt. A*.
- Maulana, M. A. (2018). Analisis faktor penyebab pembatalan faktur pajak (persepsi kantor konsultan pajak XYZ). In *Jurnal Administrasi Bisnis* (p. 124).
- Muhtarudin, & Chairunnisa, A. T. (2022). Tinjauan Aplikasi E-Faktur untuk PKP atas Pelaporan SPT Masa PPN. *Jurnal Komputer Bisnis*, 15(2).
- Norhaedah, Ernawati, Nugraha Abhull Azwad, Andi St Khadijah, Y. O. (2023). Optimalisasi Kesejahteraan Bisnis Komunitas Melalui Pemahaman Pajak. *Celebes Journal of Community Services*, 2(1), 70–75.
- Rukmania, S. (2019). *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv Agung Advertising Makassar*.